

ISBN 978-602-18574-1-0



UNTAR
FACULTY OF
ECONOMICS

IAI AFFILIATED CAMPUS

Konferensi Ilmiah Akuntansi III

Proceedings

Penerapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional dan
Dampaknya pada Aspek Perpajakan di Indonesia

Jakarta
10 - 11 Maret 2016



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

UNIVERSITAS
BUDI LUHUR

UNIVERSITAS
WIDYA DHARMA

UNIVERSITAS
UMN

GRADUATE SCHOOL OF JAKARTA
UNIVERSITY ISLAM NEGERI JAMI

UNIVERSITAS
PENGETAHUAN

UNIVERSITAS
PRESISI SANTARA

UPH

TSM
Tobago School of Management

INDONESIA

BANKING SCHOOL
SCHOOL OF FINANCIAL SERVICES

INSTITUT BISNIS NEGERIANA

KALBIS Institute
SCHOOL OF BUSINESS
Managed by BINUS UNIVERSITY

TIFA
PT TIFA FINANCE TMI

JM KANTOR AKUNTAN
JOHANN MALONDA MUSTIKA & REKAN
BAKER TILLY
INTERNATIONAL

pwc

ZMAX

ICHEW

PT O-MITRA
Finance Syariah

unifam

CPA
AUSTRALIA

KPMG

Rider

KAWAN KITA
Copy Center UNTAR

BCA

DAFTAR ISI

Kata Sambutan dari Ketua Panitia KIA III.....	i
Kata Sambutan dari Ketua IAI KAPd Jakarta Banten.....	iii
Kata Sambutan dari Rektor Universitas Tarumanagara	v
Kata Sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara	vii
Daftar Isi	ix
Susunan Panitia KIA III	xx
Susunan Reviewer / Pembahas	xxi
Susunan Acara	xxii
Jadwal presentasi	xxiv
Abstract	
AKUNTANSI MANAJEMEN DAN KEPRILAKUAN(AKMK).....	1
PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP RETURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY, PERTUMBUHAN PENJUALAN PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007-2014	2
PEMBERDAYAAN AKUNTANSI KEPRILAKUAN UNTUK MENCEGAH TERjadinya KECURANGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN MELALUI AUDIT BERBASIS ISA (INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING)(STUDI KASUS: MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN BATAVIA AIR)	3
PENGARUH SISTEM PENGUKURAN KINERJA NON-FINANSIAL DAN JOB TENSIONTERHADAP KINERJA ANGGOTA KEPOLISIAN, DIMEDIASI DENGAN MOTIVASI KERJA	4
PERAN MODERASI STRATEGI BISNIS TERHADAP HUBUNGAN ELEMEN TELEKTUAL KAPITAL DAN KINERJA PERUSAHAAN	5
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL, KEFFEKTIFAN KERJASAMA TIMSEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA SKPD KOTA BANDAR LAMPUNG.....	6
PENGARUH KOMITMEN PEMBELI, KOMITMEN PEMASOK, KEPERCAYAAN PEMASOK DAN OPEN BOOK ACCOUNTING TERHADAP INTER ORGANIZATIONAL COST MANAGEMENT	7

<i>FINANCIAL PERFORMANCE : ENVIRONMENTAL PERFORMANCE DAN ENVIRONMENTAL DISCLOSURE</i>	8
<i>PENGARUH MOTIVASI KUALITAS, KARIR, EKONOMI, SOSIAL DAN GELAR AKUNTAN TERHADAP MINAT MAHASISWA MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI</i>	9
<i>PENGARUH ASIMETRI INFORMASI DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2014</i>	10
 AKUNTANSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENDIDIKAN AKUNTANSI(AKPA).....	 11
<i>FAKTOR-FAKTOR PENENTU NIAT MAHASISWA D-III AKUNTANSI MEMILIH KARIR MENJADI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK:APLIKASI <i>THEORY OF PLANNED BEHAVIOUR</i></i>	12
<i>PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF MODEL GAMES “GEDUTAN” DALAM PEMBELAJARAN AKUNTANSI PADA SISWA KELAS X SMK - BM SE- KOTA MEDAN.....</i>	13
<i>PENGARUH MINAT, LATAR BELAKANG KELUARGA, INTELEGensi DAN AKTIVITAS TERHADAP PRESTASI MAHASISWA AKUNTANSI PADA PERGURUAN TINGGI SWASTADI WILAYAH JAKARTA SELATAN DAN JAKARTA BARAT.....</i>	14
 AKUNTANSI KEUANGAN DAN PASAR MODAL(AKPM)	 15
<i>PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE PERFORMANCE, FREE CASH FLOW, DAN PROFITABILITY TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG</i>	16
<i>ANALISIS FAKTOR UNTUK LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERNAL, KECURANGAN KARYAWAN DAN PERILAKU KERJA YANG KONTRAPRODUKTIF: SEBUAH ANALISIS EMPIRIS PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK</i>	17
<i>PENGARUH KINERJA MODAL INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN</i>	18
<i>PENGARUH KANDUNGAN INFORMASI KOMPONENT LABA RUGI KOMPREHENSIF TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2012-2013)</i>	19

PENGARUH KONVERGENSI IFRS TERHADAP ALTERNATIF MEKANISME <i>EARNINGS MANAGEMENT</i> : PENGUJIAN PADA MANAJEMEN LABA AKRUAL, MANAJEMEN LABA RIIL DAN MANAJEMEN LABA NON GAAP	20
ANALISIS SISA HASIL USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN NGANJUK	21
PENGARUH PENGUNGKAPAN INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP COST OF EQUITY CAPITAL	22
PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP KANDUNGAN INFORMASI LABA.....	23
PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, <i>FREE CASH FLOW</i> , DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN UTANG PERUSAHAAN SEKTOR BARANG KONSUMSI SERTA SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2014	24
PENGARUH <i>PRICE BOOK VALUE</i> , <i>WINNER/LOSER STOCK</i> , KEPEMILIKAN PUBLIK, DAN <i>NET PROFIT MARGIN</i> TERHADAP PRAKTIK PEMERATAAN LABA(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2014).....	25
PENGARUH INFORMASI LABA PERUSAHAAN TERHADAP REAKSI INVESTOR AKIBAT PENERAPAN PSAK NO.13 (REVISI 2007) TENTANG PROPERTI INVESTASI.....	26
THE EFFECT OF INTEREST RATE ON SHARE PRICE ON BANKING COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE.....	27
PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI DAN NON AKUNTANSI TERHADAP <i>UNDERPRICING</i> PADA PENAWARAN UMUM PERDANA/ <i>INITIAL PUBLIC OFFERING</i> (IPO)	28
IMPLEMENTASI IFRS UNTUK PENGUATAN CORPORATE VALUE DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI.....	29
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TERHADAP <i>UNDERPRICING</i> SAHAM PERDANA.....	30
PENGARUH RISIKO LITIGASI TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI.....	31

PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEBIJAKAN HUTANG, KEPUTUSAN INVESTASI DAN PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2014.....	32
PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, RASIO KEUANGAN, PREDIKSI KEBANGKRUTAN, DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP PENERIMAAN OPINI TERKAIT ISU GOING CONCERN.....	33
DETERMINANT TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN WAJIB RISIKO KEUANGAN PERBANKAN DAN PERAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI.....	34
KANDUNGAN INFORMASI BEBAN KARYAWAN DALAM MEMPREDIKSI LABA MASA DEPAN DAN RETUN SAHAM	35
PENGARUH LOAN TO DEPOSIT RATIO, NET INTEREST MARGIN, RETURN ON ASSETS, NON PERFORMING LOAN, NET PROFIT MARGIN, DAN CAPITAL ADEQUACY RATIO TERHADAP PRICE TO BOOK VALUE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009-2013).....	36
DETERMINASI ATAS STUBBEN EARNING MANAGEMENT MODEL (DALAM PERSPEKTIF TEORI PENSINYALAN)	37
<i>CORPORATE GOVERNANCE DAN POLITICAL CONNECTION SERTA PENGARUHNYA TERHADAP COST OF EQUITY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2014</i>	38
PENGARUH PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, AUDITOR TENUR DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2011 – 2013).....	39
DAMPAK ENVIRONMENTAL PERFORMANCE DAN ENVIRONMENTAL DISCLOSURE TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN	40
PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED DAN EARNING PER SHARETERHADAP RETURN SAHAM (PENDEKATAN DATA PANEL).....	41
PREDIKSI KEBANGKRUTAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN RISK BASED BANK RATING DAN BANK METER	42
PENGARUH RETURN ON ASSETS, NET PROFIT MARGIN, EARNING PER SHARE DAN PRICE TO BOOK VALUE TERHADAP RETURN SAHAM	43

PENGARUH <i>INVESTMENT OPPORTUNITY SET</i> TERHADAP <i>EARNINGS RESPONSE COEFFICIENT</i> PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.....	44
ANALISIS PENGARUH <i>FIRM SIZE, CASH RATIO, DEBT EQUITY RATIO, RETURN ON ASSET, NET PROFIT MARGIN</i> , DAN KEPEMILIKAN INSTUTISIONAL TERHADAP DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ 45.....	45
PENGARUH LABA DAN ARUS KAS TERHADAPPREDIKSI ARUS KAS MASA DEPAN.....	46
THE INFLUENCE OF PUBLIC OWNERSHIP, FIRM AGE, ACCOUNTING INCOME, AUDIT COMMITTEE SIZE, FIRM SIZE TOWARDS TIMELINESS OF FINANCIAL REPORTING(EMPIRICAL STUDY ON OTOMOTIVE COMPANY LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) PERIOD 2010-2014).....	47
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL BERDASARKAN TEORI <i>TRADE-OFF</i> PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI.....	48
KARAKTERISTIK PERSONAL TOP MANAJER DAN KINERJA PERUSAHAAN : STUDI EMPIRIS PADA BURSA EFEK INDONESIA	49
PENGARUH <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL <i>MODERATING</i>	50
AKUNTANSI SYARIAH(AKSR).....	51
ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM SYARIAHDI INDONESIA PERIODE 2012-2013DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEC.....	52
PENGARUH REGULASI ATAS PROSES SELEKSI SAHAM SYARIAH TERHADAP KUALITAS LABA DENGAN PENGUNGKAPAN <i>ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)</i> SEBAGAI VARIABEL MODERASI(STUDI EMPIRIS PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2012-2014)	53
PERSEPSI STAKEHOLDER PERBANKAN SYARI'AH TERHADAP FUNGSI AUDIT SYARI'AH(STUDI EMPIRIS PADA STAKEHOLDER PERBANKAN SYARI'AH DI JAKARTA)	54

ACCOUNTING AND TAXATION ASPECTS OF IJARA.....	55
ETIKA ISLAM DAN EARNINGS MANAGEMENT	56
AKUNTANSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERPAJAKAN(APJK)	57
PENGARUH LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN TERHADAP KUALITAS LABA DAN MANAJEMEN LABA RIIL.....	58
PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN, DISKRIMINASI, NORMA, TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK.....	59
ANALISIS KETENTUAN PAJAK YAYASAN DALAM MENENTUKAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA YAYASAN PENDIDIKAN "YPM" SIDOARJO	60
PENGARUH SIKAP, EDUKASI <i>SELF ASSESMENT</i> DAN KOMPETENSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (<i>TAX COMPLIANCE</i>): STUDI PADA WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA BARAT.....	61
PENGARUH BOOK TAX DIFFERENCES DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM TERHADAP PERSISTENSI LABA	62
ANALISIS PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PENERAPAN PAJAK E-COMMERCE	63
PENTINGNYA <i>TAX INFORMATION</i> UNTUK MENINGKATKAN <i>TAX AWARENESS</i> TERHADAP <i>TAX PAYMENT</i> DAN <i>TAX COMPLIANCE</i> DENGAN <i>TAX SERVICE</i> DAN <i>TAX MORALE</i> SEBAGAI VARIABEL MODERATING	64
PENGARUH EFEKTIFITAS DAN MINAT PENGGUNAAN <i>E-SYSTEM</i> TERHADAP PELAKSANAAN <i>SELF ASSESSMENT SYSTEM</i>	65
PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, INTENSIFIKASI PAJAK, KENAIKAN PTKP, DAN <i>TAX HOLIDAY</i> TERHADAP PENERIMAAN PAJAK ORANG PRIBADI DI JAKARTA BARAT	66
ANALISIS REVALUASI ASET TETAP TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN STUDI KASUS PT CPP.....	67
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA.....	68
PENGARUH <i>FAMILY OWNERSHIP</i> , PERUBAHAN TARIF PAJAK DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN.....	69

DAMPAK TINDAKAN PENGELAKAN PAJAK DAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK.....	70
AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SEKTOR PUBLIK(APSP).....	71
PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN (STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA SAMARINDA).....	72
PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DAERAH TERHADAP KESUKSESAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH(SURVEI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN DAN KOTA SE- PROVINSI SUMATERA UTARA)	73
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATANWAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA.....	74
FAKTOR DETERMINAN KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI AKRUAL LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	75
BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, DAN KOMITMEN MANAJAMEN TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH.....	76
MASALAH KEAGENAN DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DAERAH (STUDI ATAS PENGARUH PERUBAHAN SUMBER PENERIMAAN TERHADAP BELANJA MODAL DI INDONESIA).....	77
PENGARUH <i>FISCAL STRESS</i> DAN <i>LEGISLATURE SIZE</i> TERHADAP <i>EXPENDITURE CHANGE</i> PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA.....	78
CORPORATE GOVERNANCE DAN FRAUD & FORENSIC ACCOUNTING(CGFA)	79
THE VICIOUS CIRCLE:REFLEksi PENGELOLAAN DANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN.....	80
PENGARUH TEKANAN, KESEMPATAN, DAN RASIONALISASI TERHADAP DETEksi KECURANGAN PADA PERSEPSI AUDITOR EKSTERNAL DAN AUDITOR INTERNAL.....	81

PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA.....	82
EFFECT OF MANAGEMENT COMMITMENT, LIMITATIONS OF INFORMATION SYSTEMS, DECISION MAKING AUTHORITY OF THE GOVERNANCE OF FINANCE IN BUILDING GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE(GUG)	83
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP HUBUNGAN PERUSAHAAN KELUARGA DENGAN REAL EARNING MANAGEMENT	84
THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON FIRM VALUE: EVIDENCE FROM INDONESIA	85
MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENGUKUR KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAN TINGKAT KEPERCAYAAN INVESTOR	86
PENGARUH <i>FAMILY CONTROL</i> DAN <i>FOREIGN OWNERSHIP</i> PADA PELAPORAN KEUANGAN DI INTERNET	87
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI <i>FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT</i> DALAM PERSPEKTIF <i>FRAUD TRIANGLE</i> (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI)	88
PENDETEKSIAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS <i>FRAUD DIAMOND</i>	89
THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON EARNINGSMANAGEMENT AND DIVIDENDS.....	90
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE TERHADAP COST OF DEBT	91
PENGARUH <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN KONDISI KESULITAN KEUANGAN TERHADAP MANAJEMEN LABA MELALUI <i>DISCRETIONARY REVENUE</i>	92
MODEL PENDETEKSIAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN OLEH AUDITOR SPESIALIS INDUSTRI DENGANANALISIS <i>FRAUD TRIANGLE</i>	93

SCR DAN SUSTAINABILITY(SCRS)	94
THE INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND MECHANISM CORPORATE GOVERNANCE TOWARDS FIRM VALUE(STUDY ON MANUFACTURE COMPANIES IN INDONESIA).....	95
PENENTU PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL	96
PENGARUH PENGUNGKAPAN KINERJA EKONOMI, PENGUNGKAPAN KINERJA LINGKUNGAN,PENGUNGKAPAN KINERJA SOSIAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010-2014)	97
PENGARUH CSR PERCEPTION TERHADAP CORPORATE IDENTIFICATION, REPUTATION, TRUST, LOYALTY, DAN WORD OF MOUTH INTENTION SEBAGAI VARIABEL MODERATING.....	98
MEKANISME GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN SUSTAINABLE FINANCE: UNTUK MELIHAT TINGKAT KESIAPAN PENERAPAN SUSTAINABLE FINANCE PADA PERUSAHAAN JASA KEUANGAN TERDAFTAR DI BEI	99
SISTEM INFORMASI, PENG AUDITAN DAN ETIKA PROFESI AKUNTAN(SPEP).....	100
PENGARUH AUDIT FEE, UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, PENGETAHUAN AUDITOR, PENGALAMAN KERJA AUDITOR, DAN MOTIVASI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT(STUDI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI JAKARTA DAN TANGERANG TAHUN 2015)	101
PRAKTIK PELAPORAN MODAL INTELEKTUAL PERGURUAN TINGGI: STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA	102
PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI, DAN PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS DALAM PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGA(STUDI EMPIRIS PADA AUDITOR KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG TERDAFTAR PADA IAPI WILAYAH JAKARTA PUSAT DAN JAKARTA SELATAN)	103
ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL: STUDI EMPIRIS PADA INDUSTRI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN	104

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PRAKTIK PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL DI INDONESIA	105
DAMPAK KONFLIK AGENCY; KOMPOSISI KEPEMILIKAN, KOMPENSASI MANAJEMEN DAN LEVERAGE DALAM PERMINTAAN JASA AUDIT NONASSURANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI	106
PERBEDAAN <i>JUDGMENT</i> AUDITOR DILIHAT DARI PERSPEKTIF TEKANAN KETAATAN, GENDER, TEKANAN KESESUAIAN YANG DIPENGARUHI <i>LOCUS OF CONTROL</i> DAN KOMITMEN PROFESIOANAL(STUDI EMPIRIS AUDITOR PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI JAKARTA)	107
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUSAHAAN DALAM MELAKUKAN <i>PERGANTIAN AUDITOR</i> DI INDONESIA	108
PENGARUH KOHESIVITAS KELOMPOK KERJA DAN INDEPENDENSI TERHADAP EFEKTIVITAS AUDIT APARAT INSPEKTORAT(Studi Kasus pada Inspektorat di Karesidenan Madiun dan Karesidenan Surakarta).....	109
PENGARUHKANTABILITAS, OBJEKTIVITAS, <i>TIME BUDGET PRESSURE</i> DAN INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT	110
STRUKTURASI KONFLIK PENYESUAIAN TEMUAN AUDIT MELALUI PENELITIAN HUBUNGAN ANTARA AUDITOR DENGAN KLIEN	111
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN SISTEM ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) DALAM PROSES IMPOR	112
FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS AUDITPADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI JAKARTAINTAN MAYA SARI SIDAURUK	113
ANALISIS CONTROL SELF ASSESSMENT TERHADAP SIKLUS PENDAPATAN PADA PT IS	114
PENGARUH KEPEMIMPINAN ETIS TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DAN KERELAAN UNTUK MELAPORKAN MASALAH ETIKA	115
EFFECT OF ROLE CONFLICT AND ROLE AMBIGUITY TO AUDITOR CREATIVITY	116

PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA DENGAN KETIDAKPASTIAN PEKERJAAN DAN KOMITMEN PROFESIONAL SEBAGAI PEMODERASI(Studi Pada Staf Auditor Junior Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur).....	117
<i>THE INFLUENCE OF DIAGNOSTIC CONTROL SYSTEM AND INTERACTIVE CONTROL SYSTEM TO THE ORGANIZATION PERFORMANCE: MODERATED BY ORGANIZATION LIFE CYCLE(Empirical Study on Manufacturing Company in Banten).....</i>	118
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB, PENGALAMAN KERJA, OTONOMI KERJA, DAN AMBIGUITAS PERAN TERHADAP KINERJA AUDITOR(Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta).....	119

Analisis Revaluasi Aset Tetap terhadap Laporan Keuangan dan Perpajakan
Studi Kasus PT CPP

Linda Santioso
Andreas Bambang Daryatno

Abstract

The capital structure of a company is important because it reflects the financial condition of a company. Currently the financing of companies rely on bank loans and caused company's debt high. Along with the new government policy regarding the ratio between debt and equity of the Company for the purposes of calculating the income tax of 4: 1 (DER) and the income tax incentives on fixed assets revaluation in 2015 and 2016. The purpose of this research is to improve company's DER, calculation of costs and earnings more reasonable, and the income tax savings in future periods. This research focus in PT CPP. Data were collected by library research and field research through interviews with management's company. The contribution of this research is to provide an alternative to improve the statement of financial position, the ratio between debt and equity in accordance with government policies and savings income tax payments.

Keywords: DER, revaluation of fixed assets, income tax incentives, tax planning.

PENDAHULUAN

Dengan keluarnya kebijakan pemerintah dalam penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan (PMK No 169/PMK.010/2015) mengharuskan perusahaan untuk mencari alternatif meningkatkan modalnya, salah satunya dengan melakukan penilaian kembali aset tetap (revaluasi) perusahaan.

Aktifitas penilaian ulang aset tetap suatu perusahaan biasanya dilakukan karena adanya ketidaksesuaian yang cukup material baik di sisi laporan posisi keuangan maupun di laporan laba rugi. Hal ini bisa terjadi terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri dan memiliki aset yang masa manfaatnya sudah habis disusutkan tetapi aset tersebut tetap dipergunakan seperti bangunan, mesin, kendaraan dan lain-lain untuk aktivitas perusahaan. Dengan habisnya masa manfaat dan aset tersebut tidak dilakukan

penilaian ulang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka Laporan Posisi Keuangan tidak mencerminkan keadaan yang wajar. Akibatnya banyak perusahaan kesulitan dalam mencari investor, kesulitan pendanaan dari perbankan yang tentunya hal ini tidak diharapkan oleh semua pihak (*stakeholder* perusahaan). Dalam akuntansi, revaluasi asset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian asset tetap berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Namun menurut paragraf 15.15 (2009) penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. (Agoes dan Trisnawati; 2013;143). Dengan kewenangan pemerintah untuk mengatur penyimpangan dari konsep biaya perolehan maka dikeluarkan peraturan mengenai penilaian kembali asset tetap.

Penilaian kembali aset tetap sesuai dengan harga pasar sangat diperlukan untuk memperbaiki laporan posisi keuangan disamping untuk tujuan perpajakan dimana selisih lebih atas penilaian ulang aset tetap merupakan obyek pajak , yang bersifat final sebesar 10 % sesuai dengan Peraturan Menkeu No.79/PMK.03/2008 dan Pasal 4 huruf m UU PPh No 36 tahun 2008 jo. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-12/PJ./2009, SE 56/PJ./2009. (Pohan;2015,443)

Pemerintah saat ini mengeluarkan Peraturan Menteri keuangan Tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (PMK Nomor 191/PMK.010/2015) dimana pemerintah memberikan tarif khusus Pajak penghasilan terhadap selisih penilaian ulang aset tetap yang diajukan tahun 2015 dan 2016 baik kepada Wajib Pajak Badan, Bentuk Usaha tetap maupun Wajib Pajak Pribadi yang melakukan pembukuan, Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, Wajib Pajak yang masih berada dalam jangka waktu 5 tahun sejak dilakukannya penilaian kembali terakhir berdasarkan PMK Nomor 79/PMK.03 /2008.

Penilaian kembali Aset Tetap untuk kepentingan perpajakan dimana hasil penilaian ulang akan dilakukan penyusutan kembali sesuai golongan yang sudah ditentukan dan dapat dipakai sebagai pengurang dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Dengan dilakukan penyusutan ulang maka secara otomatis akan mengurangi penghasilan kena pajak dan pajak yang dibayarkan akan lebih kecil.

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada PT CPP yang merupakan perusahaan industri yang memproduksi kopor, tas kantor dan tas pesanan khusus . Analisis dilakukan dengan data laporan posisi keuangan perusahaan, perhitungan penilaian kembali aset tetap perusahaan yang dilakukan tahun 2015.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh perusahaan saat kebijakan pemerintah diterapkan seperti Perbandingan tingkat hutang dengan modal perusahaan (*DER*) jauh dibawah yang ditetapkan oleh pemerintah mengakibatkan beban bunga pinjaman bank tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan perusahaan, Aset tetap perusahaan banyak yang sudah habis masa manfaatnya sehingga Perhitungan biaya dan penghasilan tidak wajar, Momentum perusahaan untuk melakukan penghematan pajak di masa yang akan datang, karena pemerintah memberikan insentif terhadap pajak penghasilan final jika melakukan penilaian kembali aktiva tetap pada tahun 2015 dan tahun 2016.

KERANGKA TEORI

Debt Equity Ratio (DER)

Dengan tingkat inflasi di Indonesia yang relatif tinggi mempengaruhi kondisi inflasi suatu perusahaan, dimana dalam kondisi diatas suatu perusahaan sangat memerlukan penilaian kembali aset tetapnya sesuai harga pasar (revaluasi) supaya mencerminkan keadaan yang seujarnya. Dengan dilakukannya penilaian kembali asset tetap perusahaan sesuai harga pasar maka akan meningkatkan struktur modal sendiri, artinya perbandingan

antara pinjaman (*debt*) dengan modal sendiri (*equity*) atau yang dinamakan istilah *debt equity ratio (DER)* menjadi lebih baik. Dengan membaiknya *debt equity ratio* maka perusahaan akan lebih mudah mengembangkan usahanya melalui pinjaman ke bank atau menerbitkan surat utang (obligasi) bahkan memungkinkan untuk menerbitkan saham.

Dengan keluarnya kebijakan Menteri Keuangan yang membatasi rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio/DER*) perusahaan menjadi 4 : 1 artinya modal sendiri (*equity*) perusahaan hanya diperbolehkan melakukan pinjaman (*debt*) maksimal 4 kali nya. Jika perusahaan melakukan pinjaman melebihi batas yang sudah ditentukan maka beban bunga dari pinjaman yang merupakan faktor pengurang pajak penghasilan perusahaan (PPh) akan dilakukan koreksi fiskal. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang *DER*, akan membatasi ruang berutang korporasi semakin kecil, sehingga perusahaan harus melakukan revaluasi aset agar bisa berutang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Disamping itu seperti kita ketahui bersama, banyak perusahaan melakukan *earning management* melalui cara-cara diatas, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menutup celah yang bisa mengurangi penerimaan pajak.

Pengaruh Terhadap Laporan Posisi Keuangan Perusahaan

Dengan dilakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan sesuai dengan harga pasar, tentu saja secara langsung akan mempengaruhi laporan posisi keuangan perusahaan. Adapun selisih lebih akibat penilaian kembali akan mempengaruhi :

1. Dilihat dari sisi aktiva, Akun aset tetap perusahaan akan naik sebesar nilai lebih dari hasil penilaian kembali aset tetap (harga pasar).
2. Dilihat dari sisi pasiva, tepatnya di Ekuitas akan naik juga sebesar selisih Lebih penilaian kembali aset tetap, atau akan muncul "**saham baru**" baik berupa saham

bonus atau saham baru tanpa penyetoran. Saham baru ini **bukan objek PPh** sesuai Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010.

3. Kenaikan nilai aset tetap mengakibatkan bertambah besar nilai penyusutan aset tetap, hal ini akan memberikan penghematan pajak bagi perusahaan dimasa-masa mendatang karena dapat mengurangi pajak Penghasilan.

Jadi, dengan dilakukan revaluasi aset tetap perusahaan akan memberikan keuntungan bagi investor dimana pemegang saham mendapatkan tambahan saham yang bukan objek PPh, secara fiskal penghasilan neto akan lebih kecil dibanding tahun lalu, perusahaan bisa menambah utang ke bank untuk modal kerja atau menaikkan nilai saham sebelum *initial public offering* (IPO). (Sumber : <http://pajaktaxes.blogspot.co.id/2015/10/3>)

Insentif Pajak Penghasilan Revaluasi Aset Tahun 2015 dan 2016

Untuk menambah penerimaan dari sektor pajak penghasilan maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016 (PMK 191/PMK.010/2015). Kebijakan ini dapat memberikan tiga keuntungan bagi pelaku usaha jika pelaku usaha melakukan revaluasi aset tahun 2015 dan tahun 2016. Tetapi Jika revaluasi dilakukan tahun 2017 atau setelahnya, maka pajak atas revaliasi aset tetap tidak mendapatkan diskon.

Peraturan ini dibuat khusus, maka Peraturan Menteri Keuangan nomor 191/PMK.010/2015 tidak mencabut atau mengubah Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.03/2008. Jadi, setelah 2016 ketentuan tentang PPh atas revaluasi aset tetap akan kembali lagi ke Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.03/2008 dan tarif yang dikenakan **10%**.

*

Adapun Tarif khusus jika wajib pajak melakukan revaluasi tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut:

- 3% (tiga persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aset tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- 4% (empat persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aset tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan dimaksud dalam jangka waktu sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
- 6% (enam persen), bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan penilaian kembali aset tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, dan melunasi Pajak Penghasilan dimaksud dalam jangka waktu sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

Jadi hal yang harus diperhatikan adalah jangka waktu setor PPh atas revaluasi 3% (tiga persen) untuk tahun 2015, 4 % (empat persen) untuk semester I tahun 2016, dan 6 % (enam persen) untuk semester II tahun 2016. Jangka waktu penyetoran PPh dikenakan terhadap selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan. Selisih lebih ini diketahui setelah ada *laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai*. Inilah yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.03/2008. Keuntungan bagi Wajib Pajak yang melakukan revaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 191/PMK.010/2015 ini adalah diskon tarif PPh menjadi lebih kecil yaitu, 3%, 4% atau 6% saja.

TARIF KHUSUS PPh

Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan mendapatkan perlakuan tarif khusus apabila permohonan diajukan pada tahun 2015 dan 2016.



Sumber: Sosialisasi PMK-191 Tahun 2015, PMA I

Tata Cara Pengajuan sesuai PER Dirjen No 37/PJ/2015

Wajib pajak dapat melakukan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak tepatnya ke Kanwil DJP Domisili wajib pajak terdaftar dalam jangka waktu sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Permohonan penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan dapat diajukan oleh wajib pajak :

1. Telah melakukan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari pemerintah tetapi belum digunakan untuk tujuan perpajakan
2. Belum melakukan penilaian kembali aset tetap tetapi aset tetap di revaluasi menurut hasil perkiraan wajib pajak.

PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN



LAMPIRAN I

PER-37/PJ/2015

Aktiva Tetap

Direvaluasi oleh

KuPP

ATAU

AHLI PENILAI



LAMPIRAN II

PER-37/PJ/2015

Aktiva Tetap Direvaluasi

oleh dan atas

HASIL PERKIRAAN WP



WP Mengalih Rasa
Sosial Penilaian
Bentuknya Bantuan
Keuangan

Kayuwell 11.20
Dosenill WP Tertinggi



Cara I atau sesuai pasal 1 ayat 3 huruf a PER-37/PJ/2015 diajukan dengan melampirkan

- a. Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak penghasilan atas penilaian aktiva tetap
- b. Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali dengan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- c. Fotokopi surat ijin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut
- d. Laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilaian publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah; dan
- e. Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap

SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN

WP Melakukan Penilaian Kembali

Persyaratan



Surat
Permohonan

SSP
Pelunasan
PPn Final
Pasal 19
41128.416



SSP
Pelunasan
PPn Final
Pasal 19
41128.416



Daftar aktiva
tetap yang akan
dinilai kembali
LAMPIRAN III



Laporan
Keuangan



Kotakapi
izin maah
KJPP/ahli penila



Laporan penilaian
kembali oleh
KJPP/ahli Penila

*) Lampiran Sesuai Perdirjen No. PER-37/PJ/2015

*) Pajak terutang harus dilunasi SEBELUM pengajuan permohonan/pengajuan kelengkapan dokumen

Sedangkan cara ke 2 permohonan sesuai pasal 1 ayat 3 huruf b PER-37/PJ/2015 dengan melampirkan :

- Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak penghasilan atas penilaian aktiva tetap;
dan
- Daftar aktiva tetap yang akan dinilai kembali beserta perkiraan nilainya dengan menggunakan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dengan menggunakan format surat tambahan dokumen kelengkapan permohonan sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, wajib pajak harus melampirkan :

- Surat Setoran Pajak dalam hal terjadi kekurangan pembayaran pajak terutang;
- Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali dengan format sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

- c. Fotokopi surat ijin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari pemerintah yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut
- d. Laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilaian publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah; dan
- e. Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.

SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN

WP Melakukan Penilaian Kembali



Dokumen kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus disampaikan paling lambat pada tanggal :

- a. 31 desember 2016, untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- b. 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016; atau
- c. 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan diperoleh dari buku-buku perpajakan dan peraturan-peraturan pemerintah, sedangkan untuk penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak manajemen perusahaan dan Laporan Keuangan perusahaan.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Laporan Posisi keuangan

Dengan diberlakukan Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan mulai Tahun Pajak 2016 dan insentif pajak penghasilan tentang penilaian aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 (PMK 191/PMK.010/2015 sebagaimana diubah dengan PMK 233/PMK.03/2015 dan PER-37/PJ/2015) perusahaan melakukan penilaian kembali aset tetap. Perusahaan memutuskan untuk melakukan penilaian aset tetap karena melihat beberapa peluang keuntungan yang dapat dihasilkan antara lain :

1. Perbandingan utang dengan modal perusahaan jauh diatas 4:1 mengingat posisi modal yang minus dan pembiayaan perusahaan dilakukan dengan pinjaman dana dari perbankan.
2. Nilai buku aset tetap yang rata-rata sudah habis disusutkan mengingat perusahaan ini belum pernah melakukan penilaian kembali aset tetap dan merupakan salah satu perusahaan yang berdiri di tahun 1970 an.
3. Keuntungan hasil penilaian kembali aset tetap yaitu penyusutan hasil dari penilaian kembali aset tetap dapat dijadikan pengurang penghasilan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

PT CPP
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2015 dan 2014
(Dinyatakan Dalam Rupiah)

	31 Desember 2015	31 Desember 2014
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	2.386.288.574	2.800.716.611
Piutang Usaha	6.826.896.039	10.046.265.702
Piutang Lain-lain	-	-
Persediaan	22.489.670.639	14.290.326.439
Pajak Dibayar di muka	1.775.762.801	1.095.353.912
Uang Muka	867.400.130	259.273.000
Biaya Dibayar dimuka	<u>171.790.359</u>	<u>214.167.913</u>
Jumlah Aset Lancar	<u>34.517.808.541</u>	<u>28.706.103.577</u>
Penyertaan	146.875.000	146.875.000
ASET TIDAK LANCAR		
Harga Perolehan	31.193.338.602	29.217.577.631
Akumulasi Penyusutan	<u>(23.822.430.943)</u>	<u>(22.984.905.205)</u>
Nilai Buku	<u>7.370.907.659</u>	<u>6.232.672.426</u>
ASET LAIN-LAIN		
Harga Perolehan	7.318.472.980	7.318.472.980
Akumulasi Penyusutan	<u>(7.168.023.273)</u>	<u>(7.067.376.834)</u>
Nilai Buku	<u>150.449.707</u>	<u>251.096.146</u>
JUMLAH ASET	<u>42.186.040.906</u>	<u>35.336.747.149</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS LANCAR		
Hutang Bank	33.908.385.500	30.477.839.794
Hutang Usaha	6.123.300.495	5.315.879.904
Hutang Pajak	1.653.488.097	877.156.909
Biaya yang masih harus dibayar	284.461.865	33.272.439
Uang Muka Penjualan	<u>445.393.636</u>	<u>43.827.978</u>
Jumlah Liabilitas Lancar	<u>42.415.029.593</u>	<u>36.747.977.025</u>
EKUITAS		
Modal saham Disetor	4.348.046.000	4.348.046.000
Saldo Laba/(Rugi) Ditahan	<u>(6.205.671.373)</u>	<u>(6.643.746.858)</u>
Saldo Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	1.628.636.686	884.470.982
Jumlah Ekuitas	<u>(228.988.687)</u>	<u>(1.411.229.876)</u>

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>42.186.040.906</u>	<u>35.336.747.149</u>
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Revaluasi Aset Tetap Perusahaan

Jika dilihat dari Laporan Posisi Keuangan diatas terlihat bahwa *debt equity ratio* nya jauh diatas perbandingan 4:1 yang akan diterapkan oleh pemerintah mulai Januari 2016 sesuai PMK nomor 169/PMK.010/2015 dan nilai aktiva tetapnya juga terlihat nilai sisa buku dari keseluruhan hanya tinggal Rp 7.521.357.366 termasuk didalam aset tanah. Jadi pemilik perusahaan mempergunakan momentum kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara baik dengan melakukan penilaian kembali aset tetap. Pemilik perusahaan mempergunakan kesempatan yang baik dengan keluarnya kebijakan PMK Nomor 191/PMK.010/2015 dan perubahan di PMK 233/PMK.03/2015 serta PER Dirjen Nomor 37/PJ/2015 dimana dengan satu langkah memberikan beberapa keuntungan langsung. Adapun aset tetap yang dilakukan penilaian kembali menurut estimasi dari wajib pajak (perusahaan) dengan mengikuti prosedur ke 2 (lihat PER-37/PJ/2015) dimana :

Aktiva Tetap	Nilai Buku sebelum Revaluasi	Estimasi Nilai Buku Menurut WP	Selisih Revaluasi
Mesin	2.486.287.890	12.581.500.000	10.095.212.110
Bangunan	143.874.460	18.962.000.000	18.818.125.540
Total	2.630.162.350	31.543.500.000	28.913.337.650
PPh Disetor	Tarif 3 %		867.400.130

Perusahaan memasukkan permohonan diakhir Desember 2015 sehingga sesuai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah perusahaan mendapatkan tarif pajak sebesar 3%. Perusahaan masih membutuhkan laporan dari Kantor Jasa Penilai Publik untuk melakukan atau melengkapi permohonan diatas supaya perusahaan memperoleh persetujuan dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat.

Pengaruh Terhadap Laporan Posisi Keuangan

Sesuai dengan SAK-ETAP paragraf 15.15 yang memungkinkan pemerintah mengatur penyimpangan dari konsep biaya perolehan maka perusahaan melakukan penilaian kembali aset tetap . Selisih nilai revaluasi aset tetap diakui dalam ekuitas dengan akun “ Surplus Revaluasi Aset Tetap”. Akun tersebut dalam laporan keuangan perusahaan dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya, tetapi surplus revaluasi aset tetap dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh perusahaan. Dengan permohonan revaluasi aset tetap perusahaan jika diterima seluruhnya maka dilakukan penjurnalannya sebagai berikut:

Bangunan	15.058.554.757
Akumulasi Penyusutan Bangunan	3.759.570.783
Mesin	581.991.877
Akumulasi Penyusutan Mesin	9.513.220.233
Surplus Revaluasi Aset Tetap	28.913.337.650.
 PPh Final atas revaluasi aset tetap	867.400.130
Kas/Bank	867.400.130.

Pihak manajemen perusahaan, harus menjelaskan penyimpangan laporan keuangan perusahaan tahun 2016, supaya pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi tentang langkah revaluasi aset tetap yang pajaknya sudah dibayarkan tahun 2015 dan revaluasi aset tetap baru dijalankan mulai tahun 2016.

Penghematan Pajak Penghasilan Perusahaan

Dari aset tetap yang telah diajukan permohonan penilaian kembali sesuai estimasi dari wajib pajak, jika dianalisa lebih lanjut dapat dilihat dari tabel dibawah ini, dimana estimasi perhitungan penghematan pajak periode mendatang dengan metode penyusutan garis lurus sesuai yang diterapkan oleh perusahaan sebagai berikut:

Bulan	Penyusutan sebelum Revaluasi	Penyusutan setelah Revaluasi	Selisih Penyusutan
Jan 2016	55.756.264	183.567.316	127.811.051

Feb 2016	55.756.264	183.567.316	127.811.051
Maret 2016	55.756.264	183.567.316	127.811.051
April 2016	55.756.264	183.567.316	127.811.051
Mei 2016	55.756.264	183.567.316	127.811.051
Juni 2016	55.756.264	183.567.316	127.811.051
Juli 2016	55.756.264	183.567.316	127.811.051
Agustus 2016	55.756.264	183.567.316	127.811.051
September 2016	55.756.264	183.567.316	127.811.051
Oktober 2016	55.756.264	183.567.316	127.811.051
Nopember 2016	55.756.264	183.567.316	127.811.051
Desember 2016	55.756.264	183.567.316	127.811.051
Total	669.075.173	2.202.807.791	1.533.732.618
Penghematan Pajak	Tarif PPh Badan 25%		383.433.154

Terlihat peningkatan beban penyusutan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai pengurang penghasilan dalam 1 Tahun sebesar Rp 1.533.732.618 dengan tarif Pajak Penghasilan badan 25 % sesuai dengan pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia. Penghematan pajak yang diperoleh perusahaan di tahun 2016 sebesar Rp 383.433.154 dimana jika dibandingkan dengan pajak penghasilan final yang sudah dibayarkan perusahaan di tahun 2015 sebesar Rp 867.400.130 maka dalam waktu 2 tahun 3 bulan mendatang PPh final tersebut sudah kembali kepada perusahaan dan penyusutan selanjutnya merupakan keuntungan penghematan pajak yang diperoleh perusahaan.

Simpulan

1. *Debt Equity Ratio* perusahaan sesuai dengan kebijakan pemerintah, bahkan jauh dibawah perbandingan 4 : 1 sehingga semua beban bunga dari pinjaman bank dapat seluruhnya dibebankan sebagai pengurang penghasilan.
2. Perusahaan pada tahun 2015 harus mengeluarkan pajak penghasilan final dari selisih lebih penilaian aset tetap sebesar Rp 867.400.130 tetapi dalam waktu 2 tahun 3 bulan pajak tersebut sudah didapatkan kembali oleh perusahaan, periode selanjutnya memberikan penghematan pajak penghasilan perusahaan.

3. Perhitungan beban dan penghasilan menjadi lebih wajar.
4. Jika dikemudian hari diperlukan pembiayaan dari pihak bank yang lebih besar, maka perusahaan dengan mudah akan mendapatkannya.

Implikasi, Keterbatasan dan Saran

1. Tidak semua perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aset tetap untuk memperbaiki perbandingan komposisi hutang dan modal Perusahaan. Banyak cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperbaikinya seperti melakukan penyetoran modal saham dari pemegang saham perusahaan atau mencari investor luar yang mau menanamkan modalnya.
2. Dengan penghematan pajak yang didapat perusahaan melalui penyusutan ulang aset tetap yang dapat dikurangkan secara fiskal maka penerimaan negara di masa mendatang akan menurun padahal target penerimaan pajak selalu meningkat setiap tahunnya.
3. Perusahaan harus selalu mengikuti segala kebijakan peraturan pajak yang dikeluarkan pemerintah agar aktifitas perusahaan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes Sukrisno dan Trisnawati Estralita, 2013. Akuntansi Perpajakan, Salemba Empat, Edisi 3

Entitas Tanpa Akuntan Publik, 2009, Ikatan Akuntan Indonesia

Pohan Chairil ,(2015). Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis, Edisi revisi, Gramedia PT, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun2016.

Peraturan Menteri keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor ~~PER-12/PJ/2009~~ tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan

Peraturan Dirjen Pajak No. PER-12/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.

Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

[Http://pajaktaxes.blogspot.co.id/2015/10/3-keuntungan-revaluasi-aset-tahun-2015.html](http://pajaktaxes.blogspot.co.id/2015/10/3-keuntungan-revaluasi-aset-tahun-2015.html)